



Published every June and December

JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)

ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>



Hubungan Profesionalisme Satuan Pengawas Intern Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan (Penelitian pada BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung)

Aristanti Widyaningsih¹
Astri Dewi S.²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Abstract. *Entering the global competition, BUMN are required to implement good corporate governance. It required the existence of an effective system of internal control, especially for the sales division, as the main source of BUMN revenue derived from sales of goods and services. In the BUMN, the effectiveness of internal control systems assessed by the Internal Supervisory Unit (SPI). SPI is a profession that demanded to be professional. Therefore, the effectiveness of internal control systems selling one of them can be affected by the professionalism of SPI. This study aimed to determine whether there is a strong relationship between professionalism SPI with the effectiveness of internal control systems sales.*

This type of research is descriptive verifikative research with the research methods used are surveys. Population in this research are BUMN headquartered in Bandung by the number of sample as many as eight BUMN. Sampling technique used was saturated sampling. Unit of Analysis in this research is SPI led and the sales division manager. Analysis of statistical data used is the correlation coefficient analysis using the Spearman Rank.

Based on the results of hypothesis testing, there is a strong relationship between SPI professionalism with the effectiveness of internal control system sales, which amounted to 0,663.

Keywords: *Professionalism Intern Supervisor Unit, Effectiveness of Sales Internal Control Systems*

Abstrak. Memasuki persaingan global, BUMN dituntut mengimplementasikan Good Corporate Governance. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem pengendalian internal yang efektif, terutama bagi Divisi Penjualan karena salah satu sumber utama pendapatan BUMN berasal dari penjualan barang maupun jasa. Pada BUMN, keefektifan sistem pengendalian internal dinilai oleh sebuah profesi yaitu Satuan Pengawas Intern (SPI), sehingga SPI dituntut untuk bersikap profesionalisme. Oleh karena itu efektivitas sistem pengendalian internal penjualan salah satunya dapat dipengaruhi oleh profesionalisme SPI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara profesionalisme SPI dengan efektivitas sistem pengendalian internal penjualan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif verifikatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah survei. Populasi pada penelitian ini adalah BUMN yang berpusat di Kota Bandung dengan sampel sebanyak delapan BUMN. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Unit analisis pada penelitian ini adalah pimpinan SPI dan manajer penjualan. Analisis data statistik yang digunakan adalah analisis koefisien korelasi dengan menggunakan Spearman Rank.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terdapat hubungan yang kuat antara profesionalisme Satuan Pengawas Intern dengan efektivitas sistem pengendalian internal penjualan, yaitu sebesar 0,663. Gambaran profesionalisme Satuan Pengawas Intern pada delapan BUMN berada pada kategori sangat memadai, sedangkan sistem pengendalian intern penjualan pada delapan BUMN sudah efektif.

Kata Kunci: Profesionalisme Satuan Pengawas Intern, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan

Corresponding Author. *aristanti.widyaningsih@upi.edu*

How to Cite This Article. Hutapea, Widyaningsih. Hubungan Profesionalisme Satuan Pengawas Intern Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan (Penelitian pada BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi Riset. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan usaha telah sampai pada tahap persaingan global dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh. Dengan implementasi GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif. Prinsip-prinsip GCG berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN mencakup transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Secara umum, governance lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi BUMN. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan Negara sehingga BUMN bertanggung jawab kepada Negara. Untuk

mencapai GCG, aktivitas BUMN dituntut agar efektif dan efisien serta menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Akan tetapi dalam mewujudkan GCG, BUMN mengalami berbagai hambatan dan kendala diantaranya dalam hal pengendalian intern.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2009 pada Maret 2010, Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian atau Lembaga lainnya (LKKL) menyajikan temuan-temuan atas sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan atas operasional BUMN dapat dikelompokkan pada temuan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern (SPI) dan temuan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN dalam IHPS II 2009 dan IHPS II 2010 dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2.

Tabel 1.1
Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan Pada Kementerian BUMN dalam IHPS II 2009

Jenis Kasus	Jumlah Kasus
Kasus kelemahan SPI :	
Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2
Perencanaan kegiatan tidak memadai	3
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	6
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya	11
SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	7
Jumlah	71
Temuan Karena Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan:	
Kerugian Negara/kerugian Negara yang terjadi pada perusahaan milik Negara	19
Potensi kerugian Negara/potensi kerugian Negara yang terjadi pada perusahaan milik Negara	11
Kekurangan penerimaan Negara atau perusahaan milik Negara	18
Administrasi	12
Ketidakhematan	3
Ketidakefektifan	2
Jumlah	65

Sumber: IHPS II 2009 (BPK, 2010)

Tabel 1.2
Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan Pada Kementerian BUMN dalam IHPS II 2010

Jenis Kasus	Jumlah Kasus
Kasus Kelemahan SPI :	
Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	6
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1
Perencanaan kegiatan tidak memadai	5
Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan Negara/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	1
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	8
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya	12
Lain-lain pada kelemahan sistem pengendalian anggaran pendapatan dan belanja	4
Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	7
SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	13
Jumlah	59
Temuan Karena Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan :	
Kerugian Negara (termasuk kerugian Negara yang terjadi pada perusahaan milik Negara)	15
Potensi kerugian Negara (termasuk potensi kerugian Negara yang terjadi pada perusahaan milik Negara)	24
Kekurangan penerimaan Negara atau perusahaan milik Negara	8
Administrasi	8
Ketidakhematan	9
Ketidakefisienan	1
Ketidakefektifan	13
Jumlah	78

Sumber: IHPS II 2010 (BPK, 2011)

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dapat dilihat bahwa masih cukup banyak kasus kelemahan SPI pada beberapa BUMN pada beberapa jenis kasus. Walaupun demikian, terdapat penurunan jumlah kasus kelemahan SPI pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009. Sedangkan untuk kasus ketidakpatuhan perundang-undangan terdapat kenaikan jumlah kasus pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009.

Selain data dari IHPS, pada beberapa BUMN juga terdapat kasus penyelewengan penjualan. Bentuk penyelewengan terjadi di PT. Telkom, seperti yang dilansir dari Tempo Online (16 Januari 2006). Pada Rabu 11 Januari 2006, John Welly, Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan PT Telkom ditahan polisi terkait dengan dugaan korupsi di PT Telkom senilai ratusan miliar rupiah yaitu terdapat manipulasi pulsa yang dilakukan Telkom dengan teknologi voice over Internet protocol (VoIP). Dari investigasi polisi dan informasi dari orang dalam, terungkap adanya pencurian pulsa sambungan langsung internasional (SLI) dan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ). Dalam prakteknya, Telkom dan Mobisel melakukan kerjasama dalam memanipulasi sambungan langsung internasional (SLI) menjadi tarif lokal.

Dari beberapa fenomena di atas, penyebab adanya penyelewengan penjualan dan kerugian pada BUMN salah satunya disebabkan oleh kelemahan atau tidak efektifnya sistem pengendalian intern. Untuk mengatasi kasus-kasus penyelewengan, diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang efektif. Seperti yang dijelaskan oleh COSO (*The Comitee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*), definisi dari pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh direktur, manajemen dan karyawan lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang : (1) Efektifitas dan efisiensi operasi, (2) Kehandalan laporan keuangan, dan (3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, pengendalian intern sangat penting terutama sistem pengendalian intern penjualan. Untuk meningkatkan pendapatan laba serta meminimalisir kerugian, perlu adanya suatu aktivitas sistem pengendalian intern yang efektif. Sehingga dibutuhkan suatu pihak yang memeriksa dan mengevaluasi struktur pengendalian internal secara periodik dan membuat rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Pada BUMN, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI).

Setiap BUMN harus memiliki SPI, hal ini sesuai dengan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, PP No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN Pasal 66 ayat 1 dan 2, serta Kepmen BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN, Pasal 22 (1). SPI merupakan unit kerja yang bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan (manajemen), dan pelaksanaan serta memberikan saran perbaikannya. SPI memiliki peran yang sangat penting untuk ikut membantu dalam mewujudkan sistem pengendalian internal dengan menjalankan fungsi pengawasan dan berperan sebagai mitra strategis unit kerja dalam mencapai sasaran usaha. Untuk itu profesionalisme SPI sangat dituntut dalam menjalankan tugas dan fungsi SPI.

Penelitian sebelumnya terkait dengan profesionalisme Satuan Pengawas Intern dan pengendalian internal dilakukan oleh Triagustia, Shinta Carlina (2004) dan Juanita Purba (2010). Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil salah satu variabel dari masing-masing penelitian. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis mengambil variabel X dari (2010) yaitu efektivitas sistem pengendalian internal penjualan. Penulis memilih sistem pengendalian internal penjualan karena penjualan merupakan sumber utama pendapatan BUMN baik itu penjualan barang maupun jasa. Sehingga diperlukan suatu sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang menyebabkan kerugian perusahaan.

Penulis bermaksud melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dengan melakukan penelitian pada sembilan BUMN yang ada di Kota Bandung. Penulis memilih BUMN karena merupakan salah satu aset nasional yang memiliki peranan penting dalam pembangunan sehingga sangat perlu pengendalian internal yang efektif. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Hubungan Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern dengan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan”

KAJIAN LITERATUR

a. Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern (SPI) menurut Bambang Hartadi (2000:35) adalah “Bagian atau unit dalam organisasi yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang ditujukan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan membantu para anggota organisasi agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab secara efektif”.

b. Profesionalisme

Pengertian profesionalisme itu sendiri menurut Arens, Elder, dan Basley (2005:78) yaitu *‘Professional means a responsibility for conduct that extends beyond satisfying*

individual responsibilities and beyond the require ments of our society law and regulations’.

c. Profesionalisme Satuan Pengawas Intern

Menurut Standar Profesi Auditor Internal (SPAI) yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, dan juga menurut Akmal (2006:12), wujud profesionalitas dan peran profesi auditor internal dalam perusahaan adalah :

1. Independensi dan objektivitas
2. Keahlian dan kecermatan profesional
3. Ruang lingkup pekerjaan auditor internal
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
5. Manajemen bagian audit internal.

d. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2002:180) definisi pengendalian internal adalah “Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan 3 tujuan yaitu: (1)Keandalan pelaporan keuangan, (2)Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan (3)Efektivitas dan efisiensi operasi”.

e. Efektivitas

La Midjan dan Azhar Susanto (2004:100) mendefinisikan efektivitas sebagai ‘suatu ukuran yang menunjukkan satu atau beberapa tujuan yang telah dicapai’.

f. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan

Pelaksanaan sistem pengendalian internal dikatakan efektif jika lima unsur pengendalian intern telah terpenuhi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring

g. Hubungan Profesionalisme Satuan Pengawas Intern (SPI) Dengan Sistem Pengendalian Intern

SPI berkewajiban menilai keefektifan sistem pengendalian dan dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan norma-norma praktek profesional internal audit. SPI dapat menyusun pengendalian intern yang baik dan tepat, mengadakan pengawasan pelaksanaannya, mengukur dan menilai serta memberi rekomendasi perbaikan untuk manajemen.

Kerangka Pemikiran

BUMN adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara, Negara merupakan pemilik tunggal saham atau juga sebagai pemilik sebagian besar saham. Dengan adanya globalisasi, perusahaan-perusahaan termasuk BUMN dituntut agar dapat melaksanakan praktik Good Corporate Governance (GCG) untuk menghadapi persaingan. Seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002. Istilah Corporate Governance itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Komite Cadbury mendefinisikan Corporate Governance (Tjager, I Nyoman dalam Yunita Heryani, 2008:11) sebagai “sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan

eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders”.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa GCG membantu mencegah skandal perusahaan, penipuan, dan potensi pidana organisasi. Dalam meningkatkan pelaksanaan GCG tidak terlepas dari peran serta audit internal yang didukung oleh pernyataan Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9) bahwa audit internal membantu perusahaan mencapai tujuannya, diantaranya dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance.

Audit intern merupakan alat bantu pengendalian manajemen dalam melakukan kegiatan penilaian independen terhadap semua kegiatan perusahaan termasuk penilaian keefektifan sistem pengendalian intern. Pengendalian terhadap penjualan dilakukan karena penjualan merupakan sumber pendapatan utama yang mempunyai hubungan erat dengan tujuan perusahaan dalam memperoleh laba dan agar perusahaan dapat mencapai hasil pengembalian sebaik-baiknya atas investasi. Untuk itu diperlukan suatu pengendalian internal yang efektif terhadap transaksi penjualan untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan penjualan. Apabila suatu sistem pengendalian intern penjualan tidak efektif, maka akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Sistem pengendalian internal penjualan dikatakan efektif apabila telah memenuhi lima komponen pengendalian internal dan tercapainya tujuan pengendalian internal penjualan. Menurut Arens dan Loebbecke (2006:274) komponen pengendalian internal terdiri dari:

1. Lingkungan pengendalian (control environment)
2. Penaksiran risiko (risk assessment)
3. Aktivitas pengendalian (control activities)
4. Informasi dan komunikasi (information and communication)
5. Pengawasan/Pemantauan (monitoring).

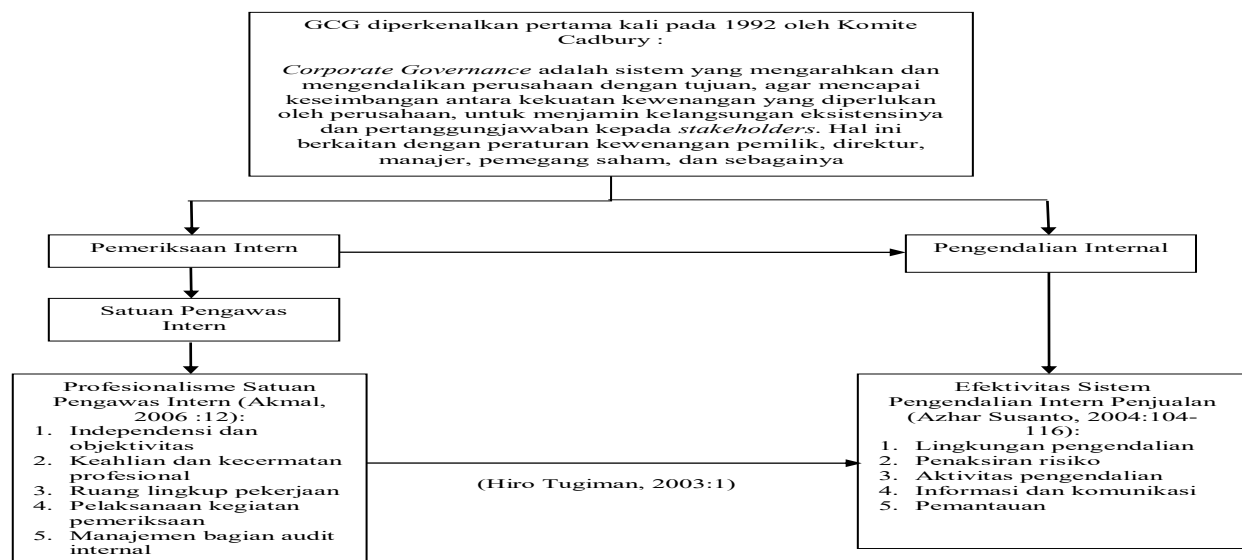
Dalam BUMN, fungsi auditor internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI). Pengertian SPI menurut Undang-undang RI No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Bab IV Satuan Pengawasan Intern pasal 67-69 : ‘Satuan Pengawasan Intern adalah suatu badan yang bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional Persero serta penilaian pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya pada Persero yang bersangkutan serta memberikan saran-saran perbaikan’. SPI sebagai auditor intern harus dapat menyusun pengendalian intern yang efektif, mengadakan pengawasan pelaksanaannya, mengukur dan melakukan penilaian serta memberikan rekomendasi untuk manajemen. Rodriguez dalam Hiro Tugiman (2006:49) menyatakan bahwa internal auditor telah memenuhi kriteria sebagai profesi, maka sikap yang dilakukan internal auditor harus profesional (profesionalisme). Arens, Elder dan Beasley (2003:24) menyatakan bahwa untuk dapat bekerja secara efektif, seorang auditor intern harus berada dalam posisi yang independen terhadap lini fungsi dalam suatu organisasi. Sedangkan independensi merupakan salah satu wujud profesionalitas auditor internal, seperti yang diungkapkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, dan juga dalam Akmal (2006:12), wujud

profesionalitas dan peran profesi auditor internal dalam perusahaan adalah :

1. Independensi dan objektivitas
2. Keahlian dan kecermatan profesional
3. Ruang lingkup pekerjaan auditor internal.
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
5. Manajemen bagian audit internal.

Kaitan antara profesionalisme auditor internal dengan pengendalian internal diungkap oleh Hiro Tugiman (2003:1) bahwa auditor internal berkewajiban untuk menyediakan informasi tentang kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian dan dalam menjalankan fungsinya harus konsisten dengan norma-norma praktek profesional internal audit. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor internal berkewajiban memberikan penilaian keefektifan sistem pengendalian dan dalam menjalankan fungsinya tersebut, auditor internal harus mematuhi norma-norma praktek profesional. Dengan kata lain profesionalisme auditor internal sangat berperan dalam melakukan penilaian keefektifan sistem pengendalian internal. Oleh karena itu diduga bahwa profesionalisme Satuan Pengawas Intern berhubungan dengan efektivitas sistem pengendalian intern penjualan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini terdapat hubungan yang kuat antara profesionalisme Satuan Pengawas Intern (SPI) dengan efektivitas sistem pengendalian internal penjualan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survei. Pengertian metode deskriptif menurut Moh. Nazir (2003:54) : ‘Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang’. Adapun pengertian metode survei menurut Moh. Nazir (2003:56) adalah “penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah”.

Populasi dalam penelitian ini adalah BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung). Adapun jenis sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh atau disebut juga sensus. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pimpinan SPI dan manajer penjualan atau pemasaran. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pengukuran skala ordinal. Menurut Moh. Nazir (2003:130) ‘Ukuran ordinal adalah angka yang diberikan di mana angka-angka tersebut mengandung tingkatan’.

Untuk memperoleh data tentang hubungan profesionalisme Satuan Pengawas Intern dengan efektivitas sistem pengendalian internal penjualan, dibuat daftar pertanyaan (kuesioner) dengan menggunakan skala diferensial semantik atau semantic differensial

scale. Skala perbedaan semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar (dua kutub), karakteristik bipolar tersebut mempunyai tiga dimensi dasar sikap seseorang terhadap objek diantaranya potensi, evaluasi dan aktivitas (Riduwan, 2008:90-91). Adapun tingkat nilai-nilai untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Skor Jawaban Responden

No	Klasifikasi		Skor
1.	Sepenuhnya Sesuai	Selalu Dilakukan	5
2.	Sebagian Besar Sesuai	Sering Dilakukan	4
3.	Cukup Sesuai	Kadang Dilakukan	3
4.	Sebagian Kecil Sesuai	Jarang Dilakukan	2
5.	Tidak Sesuai	Tidak Pernah Dilakukan	1

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

• Menganalisis Hasil Kuesioner

1. Setelah semua kuesioner terkumpul, data tersebut dikelompokkan menurut kelompok indikator masing-masing variabel, kemudian dilanjutkan dengan memberikan skor untuk jawaban dari setiap item pertanyaan yang diajukan. Setelah diberi skor untuk jawaban dari setiap item pertanyaan, maka dijumlahkan total keseluruhan nilai skor per indikator atau yang disebut skor item.

2. Menghitung besarnya tingkat variabel X (profesionalisme Satuan Pengawas Intern) dan variabel Y (efektivitas sistem pengendalian internal penjualan) dengan cara mencari rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Rumus rata-rata (*mean*) yang digunakan adalah sebagai berikut (Husein Umar, 2008:106):

$$\text{a. } \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad \text{b. } \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$$

Dimana:

$\bar{x}$ dan $\bar{y}$ = Nilai rata-rata

$\sum$ = Sigma (jumlah)

x_i, y_i = Nilai ke-i sampai dengan ke-n

3. Langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria pengklasifikasian untuk variabel X dan variabel Y

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RS = \frac{(m - n)}{b}$$

(Husen Umar, 2003:201)

Keterangan:

RS = Rentang Skor

M = Skor tertinggi item

n = Skor terendah item

b = Jumlah kelas

Dari rumus di atas maka dapat dihitung sebagai berikut:

- Skor tertinggi (jumlah responden dikalikan dengan skor tertinggi) = $5 \times 8 = 40$

- Skor terendah (jumlah responden dikalikan skor terendah) = $1 \times 8 = 8$

$$RS = \frac{(40 - 8)}{5} = 6,4$$

Tabel 2.2
Kriteria Rentang Pengklasifikasian

Variabel	Kategori	Rentang Pengklasifikasian
Profesionalisme Satuan Pengawas Intern	Tidak memadai	8 - <14,4
	Kurang memadai	14,4 - <20,8
	Cukup memadai	20,8 - <27,2
	Memadai	27,2 - <33,6
	Sangat memadai	33,6 - 40
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan	Tidak efektif	8 - <14,4
	Kurang efektif	14,4 - <20,8
	Cukup efektif	20,8 - <27,2
	Efektif	27,2 - <33,6
	Sangat efektif	33,6 - 40

• Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2005:115), instrumen memiliki validitas konstruksi yang baik jika nilai korelasi antar faktor tersebut positif dan besarnya lebih dari atau sama dengan 0,3. Variabel X dan Y dalam berskala ordinal, maka derajat korelasi dicari dengan menggunakan koefisien korelasi *Rank Spearman* dengan rumus sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

(M.Iqbal Hasan, 2008: 307)

Keterangan:

r_s : koefisien korelasi *Rank Spearman*

n: banyaknya pasangan data

d: beda urutan dalam satu pasangan data.

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. Pendapat Hair (1998) dalam Arfan Ikhsan (2008:217) menjelaskan bahwa sebuah variabel dikatakan reliabel jika nilai koefisien *Cronbach Alpha* mencapai 0,7 atau lebih. Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus koefisien *Cronbach Alpha* sebagai berikut (Husein Umar, 2008:59-60):

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2} \right]$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n}$$

Keterangan:

α = Cronbach coefficient alpha

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah varian butir

σt^2 = Varian total

k = Banyak butir pertanyaan

x = Nilai skor yang dipilih

n = Jumlah responden

• Rancangan Pengujian Hipotesis

a. Penetapan Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya hubungan yang kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kedua variabel dikatakan memiliki hubungan yang kuat jika memiliki nilai koefisien korelasi 0,6 – 0,799 (Riduwan, 2008:136). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah pengujian hipotesis null (H_0) yang menyatakan bahwa koefisien korelasi tidak berarti atau tidak signifikan sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa koefisien korelasinya berarti atau signifikan. Adapun perumusan H_0 dan H_a adalah sebagai berikut:

$H_0: \rho < 0,60$

Tidak terdapat hubungan yang kuat antara profesionalisme Satuan Pengawas Intern dengan efektivitas sistem pengendalian internal penjualan.

$H_a: \rho \geq 0,60$

Terdapat hubungan yang kuat antara profesionalisme Satuan Pengawas Intern dengan efektivitas sistem pengendalian internal penjualan

b. Pemilihan Tes Statistik dan Perhitungan Tes Statistik

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis korelasi *Rank Spearman* karena variabel berskala ordinal dengan ketentuan jumlah sampel $5 < n < 30$ (Riduwan, 2008:132) dengan rumus sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2-1)}$$

(Riduwan, 2008: 132)

Keterangan:

r_s : koefisien korelasi *Rank Spearman*

n: banyaknya sampel yang diteliti

d: selisih setiap pasangan rank

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan pengujian statistik maka peneliti menggunakan alat bantu yakni *SPSS v.20*. Dari koefisien yang dihasilkan dapat diinterpretasikan derajat hubungan antara kedua variabel yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang/Cukup kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Riduwan (2008:136)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum, gambaran mengenai variabel X (Profesionalisme Satuan Pengawas Intern) secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi rata-rata jawaban untuk variabel X di bawah ini:

Tabel 3.1
Rekapitulasi Rata-Rata Jawaban Untuk Variabel X (Profesionalisme Satuan Pengawas Intern)

No	Profesionalisme Satuan Pengawas Intern	Rata-rata	Kategori
1.	Independensi dan objektivitas	35,5	Sangat Memadai
2.	Kemampuan profesional	34,25	Sangat Memadai
3.	Ruang lingkup pekerjaan	34	Sangat Memadai
4.	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan	36	Sangat Memadai
5.	Manajemen bagian audit internal	33,5	Memadai
Jumlah		173,25	Sangat Memadai
Rata-rata		34,65	

Sumber: Hasil Penelitian yang Telah Diolah

Sedangkan gambaran mengenai variabel Y (Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan) secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi rata-rata jawaban untuk variabel Y di bawah ini:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rata-Rata Jawaban Untuk Variabel Y (Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penjualan)

No	Profesionalisme Satuan Pengawas Intern	Rata-rata	Kategori
1	Lingkungan pengendalian	31,4	Efektif
2	Penilaian risiko	30,75	Efektif
3	Aktivitas pengendalian	32,25	Efektif
4	Informasi dan komunikasi	28,7	Efektif
5	Monitoring	28	Efektif
Jumlah		151,1	Efektif
Rata-rata		30,22	

Sumber: Hasil Penelitian yang Telah Diolah

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai korelasi *Spearman Rank* sebesar 0,663 untuk Profesionalisme Satuan Pengawas Intern terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan. Berdasarkan tabel 2.3 Tentang Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi, nilai korelasi 0,663 berada dalam

rentang nilai antara 0,60 – 0,799 atau tergolong memiliki hubungan yang kuat sehingga hipotesis yang diajukan peneliti dapat diterima.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada unit SPI (Satuan Pengawas Intern) dan divisi penjualan pada delapan BUMN yang berkantor pusat di Bandung mengenai hubungan antara profesionalisme Satuan Pengawas Intern dengan efektivitas sistem pengendalian internal penjualan dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambaran profesionalisme SPI pada delapan BUMN yang berkantor pusat di Bandung berada pada kategori sangat memadai.

2. Secara keseluruhan, gambaran efektivitas sistem pengendalian internal penjualan pada delapan BUMN yang berkantor pusat di Bandung telah dilaksanakan dengan efektif.
3. Profesionalisme SPI memiliki hubungan yang kuat dengan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan BUMN. SPI yang profesional akan menyebabkan sistem pengendalian internal penjualan yang semakin efektif.
- b. Berdasarkan data yang diperoleh dan telah diolah, sistem pengendalian intern penjualan pada delapan BUMN yang berkantor pusat di Bandung sudah berjalan efektif. Akan tetapi untuk pencegahan terjadinya penyimpangan terkait penjualan maka diperlukan adanya suatu pengawasan (monitoring) yang lebih ketat lagi. Sehingga tidak timbul penyalahgunaan atau hal-hal yang menyebabkan kerugian perusahaan.

Saran

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data untuk melakukan analisis dan memperoleh kesimpulan, pada bagian ini penulis mencoba mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan hubungan profesionalisme SPI dengan efektivitas sistem pengendalian internal penjualan, yaitu :

- a. Berdasarkan data yang diolah, setiap fungsi SPI pada delapan BUMN yang berkantor pusat di Bandung telah bersikap profesional dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal. Akan tetapi, kualifikasi Sumber Daya Manusia pada unit SPI harus senantiasa dikembangkan melalui pelatihan, seminar, serta pendidikan berkelanjutan agar wawasan dan pengetahuan auditor semakin luas dan update. Dengan semakin berkualitasnya auditor, maka tingkat kesadaran profesionalisme akan semakin tinggi sehingga dalam melakukan analisis dan memberikan rekomendasi akan semakin baik. Selain itu pimpinan audit internal harus lebih baik lagi dalam mengelola bagian audit internal.

- c. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian sejenis, sebaiknya lebih fokus pada penjualan jasa atau manufaktur saja serta menambah variabel faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas sistem pengendalian intern penjualan misalnya Sistem Informasi Akuntansi dan anggaran penjualan. Selain itu bagi peneliti selanjutnya juga dapat menambah jumlah sampel penelitian dan pada lokasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. (2006). *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. Jakarta: PT. Indeks, Kelompok Gramedia.
- Arens, Alvin A. and James K. Loebbecke. (2006). *Auditing An Integrated Approach*. New Jersey : Prentice Hall International.
- Arens, Alvin A., Randal J.Elder, Mark S. Beasley. (2003). *Auditing dan Pelayanan Verifikasi*. Jakarta : Indeks.
- Arens, Alvin A., Randal J.Elder, Mark S. Beasley. (2005). *Auditing and Assurance service, An Integrated Approach. 11th Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall inc.
- Arfan Ikhsan. (2008). *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Azhar Susanto. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi, Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer*. Bandung: Lingga Jaya.
- Bambang Hartadi. (2000). *Sistem Pengendalian Internal Dalam Hubungan dengan Manajemen dan Audit*. Yogyakarta : BPFE.
- Bodnan, George H and William S. Hopwood. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi*. (Penerjemah : Amir Abadi Jusuf). Jakarta : Salemba Empat.
- United States of America : John Wiley and Sons, inc.
- Hair, J.F. 1998. *Multivariate Data Analysis. Fifth Edition*, Internasional Edition. Prentice Hall.
- Husein Umar. (2003). *Metode Riset (Perilaku Konsumen Jasa)*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Husein Umar. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Juanita Purba. (2010). “Pengaruh Pemeriksaan Intern Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan pada Tujuh BUMN yang Ada Di Kota Bandung”. Skripsi. Bandung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal.(2004). *Standar Profesi Auditor Internal*. Jakarta.
- La Midjan dan Azhar Susanto. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi I*. Bandung : Lingga Jaya.
- M. Iqbal Hasan. (2008). *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensi)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Maringan.(2008). “Hubungan Fungsi Satuan Pengawas Intern dengan Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan (Persepsi Internal Auditor Pada PT. Pindad Persero).Skripsi. Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Moh.Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mulyadi. (2002). *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Riduwan. (2008). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung : Alfabeta.
- Triagustia, Shinta Carlina. (2009). “Peranan Profesionalisme Satuan Pengawas Intern Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Atas Penggajian pada PT. Telkom”. Skripsi. Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tjager, I Nyoman, et all. (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.

- Hiro Tugiman. (2003). *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta : Kanisius <http://www.bpk.go.id>
<http://www.len.co.id>
- Hiro Tugiman. (2006). *Pandangan Baru Internal Auditing*. Yogyakarta : Kanisius. <http://www.pindad.com>
<http://www.telkom.co.id>
<http://www.tempo.com>
<http://www.biofarma.co.id>